

HOTLINE REDAKSI

Telp. (0751) 25001-36923
 Fax. (0751) 33572
 email : singgalang.redaksi@gmail.com
 website : www.hariansinggalang.co.id
 epaper : epaper.hariansinggalang.co.id

INFO & PENGADUAN

Tlp. (0751) 25001-38338
 Fax. (0751) 811005
 Iklan :08126605015
 Pemasaran: 085355173999
 Redaksi : (0751) 36923
 email: iklasinggalang@yahoo.co.id

Selasa, 10 Oktober 2023 (25 Rabiul Awal 1445 H)

16 Halaman (Dalam 2 Bagian)

Rp5.000,- + Ongkos Kirim
 Luar Kota



Jadwal Shalat Hari Ini

Subuh : 04.48 WIB
 Zuhur : 12.09 WIB
 Ashar : 15.18 WIB
 Maghrib : 18.13 WIB
 Isya : 19.21 WIB

Sumber: Kompas.com

KOMENTAR

Kerajinan Khas 50 Kota ke Event Internasional

ADI BERMASA



PEMERINTAH bersama pengusaha di Kabupaten 50 Kota, terus berupaya meningkatkan dan menggenjot pengrajin di daerahnya. Dalam rentang waktu, 4-8 Oktober 2023, sebanyak tujuh jenis kerajinan khas Luak Nan Bungsu ini diboyong ke event bergengsi Internasional Handicraft Trade Fair yang digelar di Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta, (Singgalang, Kamis 5/10).

Kehebatan Sumatra Barat dalam berbagai jenis kerajinan rakyat, memang sudah terkenal sejak lama. Belum merdeka negeri ini, tenunan Kubang, Silungkang, informasinya sudah mendunia. Bahkan kalau dirunut sampai ke bawah, boleh jadi masing-masing nagari di Sumatra Barat punya usaha kerajinan rakyat yang sudah melegenda.

Di balik kebanggaan daerah ini punya beragam usaha kerakyatan sejak doeloenya, dan sekarang sudah era moderen, sudah saatnya penampilan daerah ini jangan lagi populernya di gelanggang nasional maupun internasional, sifatnya sesaat saja. Sebutlah yang sifatnya pameran dilaksanakan swasta maupun lembaga pemerintahan.

Sudah momennya pengusaha daerah, sebutlah hasil kerajinan khas Silungkang, Tenun Kubang 50 Kota, sulaman Koto Gadang dan beragam usaha ekonomi produktif garapan warga Sumbar, bagai mana supaya mudah mendapatkannya di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Kita pun maklum, pebisnis beragam kerajinan di Indonesia rata-rata di antara mereka pasti ada warga Padang atau Sumatra Barat. Semakin besar kotanya pasti semakin banyak warga Minang di sana. Untuk itu, momen saling membina hubungan bisnis sesama pengusaha Minang yang bertebaran di republik ini, pantas berada dalam satu wadah kelembagaan, yang tujuannya memaksimalkan beragam produk Minang di pasar yang sifatnya ke-Indonesiaan. Berlanjut

Bersambung ke A-7



PENGAWALAN DELEGASI KTT AIS

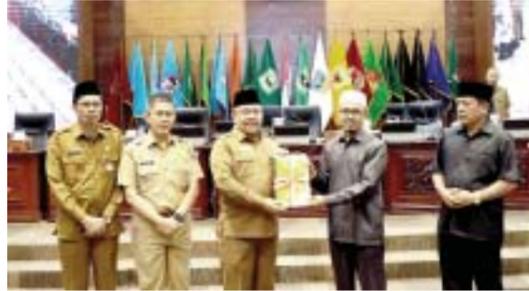
Sejumlah polisi militer mengawal mobil delegasi di area pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Archipelago and Island States (AIS) Forum 2023 di Nusa Dua, Bali, Senin (9/10). KTT tersebut akan berlangsung 10-11 Oktober 2023 ini. (Antara)

PERUBAHAN STRUKTUR DI LINGKUP PEMPROV

Enam OPD Bakal Dihilangkan

PADANG - SINGGALANG

Jumlah dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah. Akan ada dinas yang dipisah, digabungkan dan ada pula yang naik kelas. Rencana awal, ada enam OPD yang hilang.



SERAHKAN - Sekdaprov Sumbar, Hansastri, menyerahkan nota penjelasan dua Ranperda pada pimpinan DPRD Sumbar, Senin (9/10) di gedung wakil rakyat setempat. (ist)

Rencana perubahan ini sedang dilakukan seiring mulai dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Ketiga tentang Pembentukan Susunan dan Perangkat Daerah.

Gubernur Sumbar diwakili Sekdaprov Hansastri telah menyerahkan nota penjelasan tentang Ranperda tersebut saat rapat paripurna, Senin (9/10) di DPRD Sumbar.

Wakil Ketua DPRD Sumbar,

Irsyad Safar setelah rapat paripurna tersebut mengatakan, DPRD dan Pemprov akan segera membahas dan menyelesaikan ranperda perubahan tersebut untuk kemudian diterangkan di pemerintahan provinsi.

"Jika kita melihat jangka waktunya, efektif pemberlakuan nya nanti pada perubahan APBD Tahun 2024," ujar Irsyad. Ia memaparkan, akan ada OPD yang dipisah, digabung dan ada yang naik kelas. Kemungkinan pula ada yang baru dibentuk.

"Itu disesuaikan dengan beban kerja dan bertujuan untuk pening katan kinerja," katanya.

Terkait kepastian OPD-OPD mana saja dan berapa jumlahnya, menurut Irsyad, masih akan dibahas Pemprov dan DPRD.

"Namun saat kita rapat Bamus (Badan Musyawarah) kemarin, ada enam OPD hilang. Ini dikarenakan penggabungan. Cuma itu pembahasan awal. Kepastiannya nanti tentu saat pembahasan," tegas Irsyad.

Sementara salah satu OPD yang naik kelas dari tipe sebelumnya, yakni Sekretariat DPRD Sumbar karena meningkatnya beban kerja.

Sekdaprov Sumbar, Hansastri, mengatakan, perubahan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dilakukan untuk menciptakan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Bersambung ke A-7

Orbita Himmahindin
DOMPET DHUFA SINGGALANG
 Jalan H. Saemudin No. 20-C, Pasar Nagi,
 Padang Barat, Kota Padang

Zakat Penghasilan

Sumber yang bersih lebih aman, lebih berkah

Salurkan Zakat Anda melalui

mandi **11.000.500.4888**
 dan Dompet Dhuafa Singgalang

BSI **234.2222.40**
 dan Dompet Dhuafa Republik

Informasi: (0752) 40098 & 09007023333

Pojok

- + Enam OPD bakal dihilangkan
- Bialah, nan penting gaji ju tunjangan ndak ilang..
- + Investor bisa pakai lahan IKN sampai 190 tahun
- Tanggung mah, baa ndak ganok se 200 taun?

tergantung

Imbang, Kabau Sirah ke Puncak Klasemen



Padang, Singgalang Target meraih kemenangan kedua kandang gagal diraih skuad Semen Padang FC. Kendati imbang, Kabau Sirah tetap

ke puncak klasemen Grup 1 dengan nilai delapan sama dengan Persiraja. Tapi, Semen Padang unggul selisih gol.

Menjamu PSMS Medan, tadi malam di Stadion H. Agus Salim, Padang, kubu tuan rumah lebih dulu leading saat pertandingan memasuki menit 25. Gol brilian sambil salto dipe ragakan striker asing, Kenneth Ngwoke. Gol indah pemain asal Afrika itu berkat assist matang Firman Juliansyah dari sisi sudut korner PSMS, 1-0

Bersambung ke A-7

Kemlu Imbau 230 WNI Segera Keluar dari Israel

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mencatat ada 230 warga negara Indonesia (WNI) yang sedang berwisata religi di Israel. Kemlu mengimbau para WNI itu segera keluar dari Israel yang sedang berperang dengan kelompok Hamas.



Judha Nugraha

Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, di Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Judha mengimbau para WNI itu segera keluar

Bersambung ke A-7

2 Juta Ton Beras Impor Masuk RI Bulan Depan



Arief Prasetyo Adi

JAKARTA - Indonesia bakal mengimpor 2 juta ton beras untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP). Beras impor tersebut diperkirakan paling lambat tiba di Indonesia pada November mendatang.

Hal itu diungkapkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. "Dua juta ton beras November ini (datang) paling lambat," ungkapnya kepada detik-

Bersambung ke A-7

UU DIKETOK

Investor Bisa Pakai Lahan IKN Sampai 190 Tahun



JAKARTA - Pemerintah meng gelar karpet merah kepada para investor yang berminat menggarap proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Salah satunya, dalam bentuk pemberian hak atas tanah dalam waktu yang cukup lama.

Hal ini diatur dalam Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) yang telah resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (3/10) lalu.

Bersambung ke A-7

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Pemosisan Nasional Madani Cabang Padang akan melakukan penjualan secara umum (Lelang) dengan prosedur Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang terhadap barang-barang sebagai berikut:

- 1. WISUDA** berupa: Sebidang Tanah seluas 1.635 M² dan Bangunan berupa rumah terpisah terdapat 10 kamar tidur yang ada di atasnya dengan SHM No. 0112/Padang Padang Lurah Suci Lurah No. - Tanggal 10/02/2012 yang terdaftar atas nama Yudianto terdapat di Nagari Padang Lurah Kecamatan Kota VIII Kabupaten Sawahlunto/Sumbar Provinsi Sumatera Barat.
(Harga Limit Rp. 175.000.000,- Uang Jaminan Rp. 40.000.000,-)
- 2. PONDIA SEPTIADI** berupa: Sebidang Tanah seluas 272 M² dan Bangunan berupa Rumah Terpisah terdapat 10 kamar tidur yang ada di atasnya dengan SHM No. 259/Negeri Alam Pauh Duo Suci Lurah No. 0009/PPD/2012 Tanggal 31 Juli 2012 yang terdaftar atas nama **PONDIA SEPTIADI** terdapat di Nagari Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat.
(Harga Limit Rp. 115.000.000,- Uang Jaminan Rp. 35.000.000,-)
- 3. SARDA WILIS** berupa: Sebidang Tanah seluas 175 M² dan Bangunan berupa rumah terpisah terdapat 10 kamar tidur yang ada di atasnya dengan SHM No. 0081/Melahan Kampung Baru Nan XX, Suci Lurah No. 4082/10 Tanggal 15 September 2010 yang terdaftar atas nama **SARDIA WILIS** terdapat di Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung/Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
(Harga Limit Rp. 350.000.000,- Uang Jaminan Rp. 70.000.000,-)
- 4. ADE PRANANTO RANITO** berupa: Sebidang Tanah seluas 171 M² dan Bangunan berupa rumah terpisah terdapat 10 kamar tidur yang ada di atasnya dengan SHM No. 0048/Melahan Kampung Baru Nan XX, Suci Lurah No. 4032/10 Tanggal 2 Juli 2010 yang terdaftar atas nama **PRANANTO RANITO** terdapat di Kelurahan Kampung Baru Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Nan XX Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.
(Harga Limit Rp. 322.000.000,- Uang Jaminan Rp. 65.000.000,-)

Syarat-syarat Lelang:

- 1. Cara Penawaran.**
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang (Closed Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Pengurusan" pada domain tersebut.
- 2. Pendaftaran.**
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan menaruh serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (yang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- 3. Waktu Pelaksanaan.**
Hari/Tanggal : Selasa
: 24 Oktober 2023
Batas Akhir Penawaran : 11:00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL Padang, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 79 Kota Padang
Penetapan Penawaran : Setelah batas akhir penawaran.
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut/datas.
- 4. Uang Jaminan Lelang.**
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang dibebankan harus sama dengan uang jaminan yang dibebankan perjual dalam pengumuman lelang ini, dibebankan sekaligus (bukan cicil).
- Selain uang jaminan lelang HARUS sudah efektif di atas nama oleh KPKNL, sebelum berakhirnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan batas akhir penyetoran uang jaminan lelang :
Hari/Tanggal : Senin 23 Oktober 2023
b. Uang Jaminan lelang dibebankan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 5. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
- 6. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Penawaran lelang harus melampirkan harga pembelian dan bes lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melampirkan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan dibebankan ke Kas Negara.
c. Penawaran diwajibkan membayar SPHTD dan pajak pertanggungjawaban biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.**
8. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya, apabila ada gugatan, tuntutan atau kewajiban yang terungkap (termasuk namun tidak terbatas pada tanggungan PBB, pajak, listrik, telepon, PAM, dll) menjadi tanggungjawab pembeli.
9. Calon peserta lelang yang menang lelang bertanggung jawab mengaktifkan kembali obyek yang di lelang.
10. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembelian menjadi beban peserta lelang.
11. Penawaran lelang bertanggung jawab atas segala biaya-biaya yang timbul di kemudian hari.
12. Pengumuman Obek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
13. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang, Telp. (0752) 83280, CP : Dharma Anka (06536480557), atau KPKNL Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang Telp. (0751) 21308.

Padang, 10 Oktober 2023
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG PADANG PANJANG
Ttd
Ari Kamalwan
Penimpin Cabang



BERSAMA - Pansus 3 DPRD Sumsel bersama Komisi IV DPRD Sumbar dan OPD terkait, Senin (9/10) di gedung DPRD Sumbar. (ist)

KONSULTASIKAN PERDA RP3KP DPRD Sumsel Kunjungi DPRD Sumbar

Padang, Singgalang
Konsultasi tentang peraturan daerah (Perda) Rencana Pembangunan/Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP), pansus 3 DPRD Sumatera Selatan berkunjung ke DPRD Sumbar, Senin (9/10).

Pimpinan tim Pansus 3 DPRD Sumsel, Rizal Kenedi, mengatakan, saat ini mereka sedang menyusun rancangan tersebut untuk kemudian diberlakukan di Sumsel. "Kami lihat, ternyata di Pulau Sumatera, hanya Sumbar yang sudah memiliki perda ini. Bahkan sudah sejak Tahun 2016 ditetapkan. Untuk itu kami datang berkonsultasi," ujarnya.

Rizal mengatakan, saat ini di DPRD Sumsel juga sedang dibahas Ranperda Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun masih dalam tahap pembahasan dan akan segera ditetapkan. "Kami sempat berkon-

sultasi dengan Kementerian setempat. Kata-kata diperbolehkan merujuk pada RTRW lama karena disusun untuk hingga tahun 2036," ujarnya.

Dia mengatakan, sebenarnya membahas ranperda RP3KP ini sudah lama namun terkendala, salah satunya terkait RTRW. Kedatangan Pansus 3 DPRD Sumsel disambut Komisi IV DPRD Sumbar yang membidangi sektor pembangunan. Hadir Wakil Ketua Komisi IV Bukhari Dt. Tuo dan M. Nurnas, Sekwan Rafli. Hadir pula perwakilan Biro Pembangunan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Bukhari Dt. Tuo mengatakan, saat ini di DPRD Sumbar sedang dilakukan pembahasan ranperda perubahan RTRW. Hal ini dilakukan karena perlunya perubahan, salah satunya menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain juga perubahan lainnya.

"Untuk Perda RP3KP ini memang sudah lama dimiliki Sumbar yakni sejak Tahun 2016," ujarnya.

Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, M. Nurnas mengatakan bahwa RP3KP mesti disusun dengan berlandaskan pada RTRW. Jika RTRW diubah, maka RP3KP pun diubah.

"RP3KP itu sejalan de-

ngan RTRW, selain juga berkaitan dengan peraturan tentang lingkungan," ujar Nurnas.

Oleh karena itu, tambah Nurnas, pasca perda RTRW disahkan akan disusun pula perubahan RP3KP. Ini dimasukkan dalam program legislasi daerah (prolegda) Tahun 2024.

Nurnas menambahkan, dalam penyusunan RP3KP, ditekankan tentang perlu ada pembuatan buku rencana dan album peta. Ini sangat penting untuk rencana pembangunan.

"Namun sayangnya buku rencana dan album peta ini tak bisa kami berikan dokumennya untuk dipelajari DPRD Sumsel. Karena kami di DPRD juga sampai sekarang belum melihat wujudnya," papar Nurnas.

Selain itu, dalam RP3KP, kata Nurnas, sangat penting untuk berkoordinasi dengan kab./kota sehingga bisa disinkronkan.

Sementara itu, Perwakilan Biro Hukum Sumbar menyarankan Pansus 3 DPRD Sumsel untuk berkonsultasi ke Kementerian. Hal ini dikarenakan DPRD Sumbar sedang menyusun perubahan RTRW.

"Biasanya RP3KP disusun merujuk pada RTRW terbaru. Jika RTRW diubah maka RP3KP perlu diubah pula untuk penyesuaian," katanya. (401)

11 Jemaah PT MMW Agam Menuju Tanah Suci

LUBUK BASUNG - Sebanyak 11 jemaah umrah PT Mudaris Mandiri Wisata Cabang Agam berangkat dari Lubuk Basung menuju Bandara Internasional Minangkabau dan selanjutnya menuju Tanah Suci, Senin (9/10). Rombongan umrah akan transit terlebih dahulu di Bandara Kuala Lumpur bersama jemaah perusahaan yang sama dari berbagai daerah menuju Makkah.

Pimpinan PT. MMW Cabang Agam Irman Naim, menjelaskan, sebelumnya jemaah umrah tersebut sudah dilakukan pembinaan manasik di kantor setempat di Lubuk Basung. "Tentunya juga dilakukan pembekalan kesiapan fisik dan mental jemaah, untuk lebih memudahkan saat pelaksanaan ibadah di Makkah dan Madinah," katanya.

Pihaknya mengimbau jemaah agar mempersiapkan diri masing-masingnya, supaya saat pelaksanaan ibadah umrah berjalan dengan lancar dan aman.

Perjalanan ibadah ini membutuhkan kesiapan yang maksimal, karena kondisi di Kota Suci tersebut dalam cuaca panas atau dingin serta adanya pemahaman yang baik dalam memperlancar pelaksanaan ibadah. "Semoga pelaksanaan ibadah umrah berjalan dengan baik dan lancar serta selalu dalam keadaan sehat walafiat hingga kembali ke Tanah Air," katanya. (210)



JEMAAH UMRAH - Sebanyak 11 jemaah umrah PT Mudaris Mandiri Wisata Cabang Agam, berangkat dari Lubuk Basung menuju Tanah Suci, Senin (9/10). (mursyidi)

SatuPena Sumbar Dorong Minat Siswa untuk Menulis



SERAHKAN BUKU - Sekretaris DPD SatuPena Sumbar, Armaid Tanjung, serahkan buku untuk pustaka SMKN 1 Enam Lingsung, Senin (9/10/2023). (ist)

PARIKMALINTANG - DPD SatuPena Sumatera Barat mengapresiasi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Enam Lingsung, Kabupaten Padang Pariaman, yang mendorong minat siswanya untuk terus menulis dan membaca buku. Melalui Gerakan Literasi Sekolah (GLS), diharapkan siswanya semakin termotivasi dalam kegiatan menulis dan membaca.

Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD SatuPena Sumatera Barat Armaid Tanjung, di hadapan siswa/siswi dan majelis guru SMKN 1 Enam Lingsung, Senin (9/10/2023) usai upacara bendera di halaman sekolah tersebut.

Kedatangan Armaid memberikan sambutan buku dari DPD SatuPena Sumatera Barat kepada Perpustakaan SMKN 1 Enam Lingsung, yang diterima Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan Pramujiya Ayuni, S.Pd. Selain itu juga memberikan hadiah buku kepada Dini Aulia Putri (kelas 11 MPLB2), yang meraih juara umum pada lomba menulis artikel yang diselenggarakan SMKN 1 Enam Lingsung dan lam rangka peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-78 lalu.

Menurut Armaid, menulis surat perlu digalakkan lagi di kalangan siswa agar terasah kemampuan menulisnya dengan baik. Dari menulis tersebut, siswa terbiasa mengungkapkan pemikiran dan perasaan ke dalam bentuk tulisan.

"Banyak pemikiran dan gagasan orang-orang hebat masa lalu diketahui karena ada meninggalkan tulisan. Mereka yang tidak menulis atau tidak ditulis, maka hilang di tengah masyarakat dan sejarah kehidupan. Sebaliknya, betapa banyak pemikir dan tokoh masa lalu yang menulis atau ditulis orang lain, yang hari ini masih dikenang sejarah. Karena itu, sejak dini siswa/siswi di lembaga pendidikan harus dipupuk agar memiliki ke mampuan menulis yang baik," kata Armaid, yang juga wartawan utama ini.

Wakil Kepala SMKN 1 Enam Lingsung bidang kurikulum Fatmawati, S.Pd, menambakan, dengan adanya GLS (Gerakan Literasi Sekolah) ini, maka pemberian punishment (hukuman) kepada siswa diganti.

Kalau dulu siswa yang melanggar peraturan, misal nya terlambat ma suk kelas, diberi hukuman olahraga fisik, menghersihkan tempat tertentu. Tapi seka rang siswa melanggar peraturan disu ruh menulis apa yang diru sakannya, kenapa melanggar peraturan, apa yang ada dalam pikiran si anak terhad dap hal tertentu.

Sanksi menulis surat ini mendorong anak-anak untuk terbiasa menulis. Selama ini tidak ada cara yang tepat digunakan untuk siswa agar mereka bisa menulis.

"Biar kan saja mereka kesal awalnya, tapi kemudian mudah-mudahan mereka paham kenapa pentingnya menulis bagi siswa/siswi SMKN 1 Enam Lingsung," kata Fat mawati. (005)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO). Tbk
KANTOR CABANG PADANG PANJANG
Jln. Jendral Sudirman No.228 Padang Panjang
Sumatera Barat - Indonesia Telp. (0752) 83280/81025756, Faca. (0752) 80888

PENGUMUMAN ULANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Meranjak Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada Suci Kabur Harian Singgalang yang terbit pada Hari Rabu, Tanggal 22 Agustus 2023, maka dengan ini berdasarkan Pasal 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Padang Panjang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur:

CV Pemata Indah, dengan aset jaminan sebagai berikut:
Sebidang tanah seluas 80m², dan bangunan ruko berstruktur permanen, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1180, atas nama Bambang Iwan Setiadi di Jl. Raya Ampang, Kel. Ampang, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Nilai Limit : Rp. 608.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 158.000.000,-

Sebidang tanah seluas 300m², dan bangunan rumah berstruktur permanen, sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1822, atas nama Bambang Iwan Setiadi di Nura Tengah terdapat di Jl. Selend Indeh IV RT 04 RW 006, Kel. Lalang Betari, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Nilai Limit : Rp. 180.000.000,-
Uang Jaminan : Rp. 210.000.000,-

Syarat-syarat Lelang:

- 1. Cara Penawaran.**
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Closed Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Pengurusan" pada domain tersebut.
- 2. Pendaftaran.**
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan menaruh serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (yang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- 3. Waktu Pelaksanaan.**
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:
Hari/Tanggal : Rabu
: 18 Oktober 2023
Batas Akhir Penawaran : 11:00 Waktu Server (sesuai WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang
Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang.
Penetapan Penawaran : Setelah batas akhir penawaran.
Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut/datas.
b. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang dibebankan harus sama dengan uang jaminan yang dibebankan perjual dalam pengumuman lelang ini, dibebankan sekaligus (bukan cicil).
- Selain uang jaminan lelang HARUS sudah efektif di atas nama oleh KPKNL, sebelum berakhirnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
c. Uang Jaminan lelang dibebankan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 5. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran harga bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh Pejabat Lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
- 6. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Penawaran lelang harus melampirkan harga pembelian dan bes lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melampirkan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan dibebankan ke Kas Negara.
c. Penawaran diwajibkan membayar SPHTD dan pajak pertanggungjawaban biayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 7. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.**
8. Obek lelang dalam kondisi apa adanya, apabila ada gugatan, tuntutan atau kewajiban yang terungkap (termasuk namun tidak terbatas pada tanggungan PBB, pajak, listrik, telepon, PAM, dll) menjadi tanggungjawab pembeli.
9. Calon peserta lelang yang menang lelang bertanggung jawab mengaktifkan kembali obyek yang di lelang.
10. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pembelian menjadi beban peserta lelang.
11. Penawaran lelang bertanggung jawab atas segala biaya-biaya yang timbul di kemudian hari.
12. Pengumuman Obek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
13. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Padang Panjang, Telp. (0752) 83280, CP : Dharma Anka (06536480557), atau KPKNL Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang Telp. (0751) 21308.

Padang (Panjang), 10 Oktober 2023
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PADANG PANJANG
Ttd
Ari Kamalwan
Penimpin Cabang

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG KHATIB SULAIMAN
Jalan Khatib Sulaiman No.65 Belanti Barat Padang Utara Kota Padang
Telepon : (0751) 44380, 443746, Facsimile : (0751) 443746
e-mail : 0068@bri.co.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Cabang Pariaman dengan penunjukan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang akan melaksanakan penjualan di muka umum LeLang Eksekusi Hak Tanggungan, terhadap barang jaminan debitur:

Leni Marlina
A. Sebidang Tanah dan Bangunan Rumah terpisah sebagai sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan SHM No. 2241, Luas Tanah 197 M² terdapat di Leni Marlina. Berlokasi di komplek Griya Am Berekah II Kota baru Lubuk Begalung Nan XX Padang.
Harga Limit Lelang : Rp. 550.000.000,-
Uang jaminan : Rp. 110.000.000,-

Syarat-syarat Lelang:

- 1. Cara Penawaran.**
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Pengurusan" pada domain tersebut.
- 2. Pendaftaran.**
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id> dengan menaruh serta mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (yang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).
- 3. Waktu Pelaksanaan.**
a. Penawaran Lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:
Hari/Tanggal : Selasa / 24 Oktober 2023
Batas Akhir Penawaran : 11:00 Waktu Server sesuai WIB
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat Lelang : KPKNL Padang, Jalan Perintis Kemerdekaan No.79 Padang
Penetapan Penawaran Lelang : Setelah batas akhir penawaran.
b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut/datas.
- 4. Uang Jaminan Lelang.**
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang dibebankan harus sama dengan uang jaminan yang dibebankan perjual dalam pengumuman lelang ini, dibebankan sekaligus (bukan cicil).
- Selain uang jaminan lelang HARUS sudah efektif di atas nama oleh KPKNL, sebelum berakhirnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang Jaminan lelang dibebankan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- 5. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran harga bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh Pejabat Lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dilakukan kembali-kali sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6. Penawaran Lelang.**
a. Penawaran Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Penawaran lelang harus melampirkan harga pembelian dan Bes Lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melampirkan kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan dibebankan ke Kas Negara.
- 7. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.**
8. Pengumuman Obek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang.
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor BRI Cabang Khatib Sulaiman pada setiap hari kerja, Telepon : Fatimah Hp. 88126725696.

Padang, 10 Oktober 2023
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG KHATIB SULAIMAN
Ttd
ARI JUMONO
Penimpin Cabang

Ma'ruf Amin Siap Berkantor di Papua



PESAWAT KHUSUS - Wakil Presiden Ma'ruf Amin naik ke Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI Angkatan Udara (AU) menuju ke Papua dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (9/10). (antara)

JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin berangkat menuju Papua dari Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin pagi (9/10), untuk berkan tor selama lima hari kerja hingga Jumat (13/10) di Jayapura.

Dengan didampingi sang istri, Wury Estu Handayani, Ma'ruf Amin beserta rombongan berangkat menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, yang lepas landas sekitar pukul 09.00 WIB menuju Bandar Udara Internasional Sultan Hasanudin, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan waktu tempuh sekitar 2 jam 20 menit.

Di Sulawesi Selatan, Ma'ruf Amin dijadwalkan singgah sementara untuk menghadiri ground breaking pembangunan Masjid Hj Andi Nurhadi di Panikang, Makassar, sekitar pukul 14.00 WIB.

Selanjutnya, Ma'ruf Amin melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Internasional Andi Amran Sulaiman.

Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Ma'ruf Amin diundang secara khusus oleh mantan menteri pertanian Amran Sulaiman untuk dua agenda di Makassar tersebut.

"Wapres, sebelum sampai di Papua, itu transit di Makassar; ada acara sebentar untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid di Makasar, punya Bapak Amran Sulaiman mantan menteri pertanian," kata Masduki.

Usai menyelesaikan dua agenda di Makassar,

Ma'ruf Amin beserta rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bandar Udara Sentani Jayapura, Papua, dengan waktu tempuh sekitar 3 jam 20 menit.

Wapres dijadwalkan tiba di Jayapura sekitar pukul 19.55 WIT dan berkantor di Jayapura dengan menempati ruang kerja Kantor Kementerian Keuangan.

Selama di Papua, Ma'ruf Amin akan membangun komunikasi dengan para kepala daerah, perwakilan pegiat hak asasi manusia (HAM), atlet, kepala suku, hingga pengusaha setempat, sebagai upaya Pemerintah dalam mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. "Jadi, ini saya kira sangat penting karena Wapres punya tanggung jawab, diberi tugas khusus oleh Pak Jokowi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua itu bisa terlaksana," ujar Masduki.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Infor masi (Juru Bicara) Wapres Masduki Baidlowi saat menyampaikan agenda kerja Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin selama di Papua pada 9-13 Oktober 2023 kepada wartawan di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (6/10) lalu, mengatakan, Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin membangun dialog bersama seluruh perwakilan aktivis hak azasi manusia (HAM) hingga kalangan atlet selama berkantor di Papua pada 9-13 Oktober 2023.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Infor masi (Juru Bicara) Wapres Masduki Baidlowi di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat, menga takan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mempercepat pemba ngunan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Jadi ini saya kira sangat penting, karena Wapres punya tanggung jawab diberi tugas khusus oleh Pak Jokowi untuk percepatan pembangunan kesejahteraan Papua itu bisa terlaksana," katanya.

Ia mengatakan Wapres akan berkantor di Jayapura, menempati ruang kerja di Kantor Kementerian Keuangan.

Kunjungan kerja Wapres diawali dengan pemanggilan para Plt gubernur dan bupati di Papua untuk menggelar rapat koordinasi terkait evaluasi capaian program nasional yang sudah terealisasi. (★)

pantas rasanya pebisnis asal Padang melihat masa depan sebagai era yang gemilang.

Akhir-akhir ini, begitu banyak generasi muda Sumbar yang melanjutkan pendidikan ke luar negeri, seperti ke Amerika, Eropa, Timur Tengah, Jepang, Cina dan Rusia. Ini sudah selayaknya, selain menyerap ilmu pengetahuan, pantas juga kerja sampingan berupa mempopulerkan produk Indonesia, terutama kerajinan rakyat.

Insyallah, jadi perhatian bagi warga asing tersebut. Tentu yang perlu adalah "kemauan" bagi mereka yang berminat. Sebaliknya, bagi yang tidak serius, tetapelah yang "bungkok dimakan sarung". Apa iya?

(Adi Bermasa; Wartawan Senior)

evakuasi warga negara Indonesia yang ada di Palestina. Rencana evakuasi disiapkan seiring perang yang terjadi di Gaza, Palestina.

"Tentunya kami sudah merencanakan," kata Judha.

Dia mengatakan rencana evakuasi merupakan bagian dari keadaan yang diliputi ketidakpastian. Namun, Judha enggan menjelaskan detail rencana evakuasi itu.

"Itu kan bagian dari kontingensi. Namun tentu detailnya tidak dapat kami siapkan namun kita sudah persiapan," ucapnya.

Judha juga mengatakan Kemlu telah melarang WNI melakukan perjalanan ke Israel maupun Palestina. Dia mengatakan WNI harus menunda perjalanan ke dua wilayah itu karena sedang terjadi perang.

"Kami meminta mereka (WNI) tidak melakukan perjalanan baik ke wilayah Israel ataupun wilayah Palestina," ucap Judha.

"Kami juga mengimbau kepada warga negara kita yang memiliki rencana untuk melakukan perjalanan ke wilayah-wilayah tersebut untuk dapat menundanya," sambungnya.

Sebelumnya, Israel telah mendeklarasikan perang terhadap Hamas. Israel pun melakukan serangan besar-besaran ke Gaza. Aksi itu dila kukan Israel untuk membalas serangan Hamas yang menewaskan ratusan warga Israel. (★)

menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Kuota itu menambah pasokan beras impor sebesar 2 juta ton yang sudah dilakukan dan tiba di RI bulan depan.

Tambahan impor beras sebesar 1,5 juta ton tersebut bakal datang dari dua negara yakni Vietnam dan Thailand.

Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya sudah mengantongi izin kuota impor tambahan dari sejumlah Kementerian. Tiga di antaranya adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, serta di internal Kementerian Pertanian.

"Sudah selesai semua (kuota izinnya). Kemenko (perekonomian) sudah, Kementerian Pertanian sudah, Kemendag sudah. Ini bukti koordinasi antar lembaga sudah sangat cepat hari ini," ucapnya.

Selain hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional ini juga menjelaskan bahwa sebanyak 1,5 juta ton beras impor tersebut akan berasal dari dua negara. Keduanya adalah Vietnam dan Thailand.

Kendati demikian, Arief mengatakan pihaknya sebenarnya berharap bahwa stok impor nasional kelak bisa dipenuhi oleh berbagai sentra pertanian dalam negeri seperti Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan.

Menurutnya, Indonesia seharusnya jangan bangga masih terus mengimpor beras dari luar negeri. "Saya ke depan pengennya sukamandi, pinrang, sidrap, lampung. Kita pengen lokal. Jangan kita bangga impor-impor terus, ini hanya emergency untuk mengisi stok level bulog," tegasnya. (★)

Mahfud Pastikan tak Ada Kiriman Asap ke Negara Tetangga



JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud Md memastikan jika tak ada kiriman asap ke negara tetangga, seperti yang dikeluhkan beberapa pihak. Ia mengatakan saat ini sudah tidak ada lagi kiriman ke negara tetangga, seperti tahun-tahun sebelumnya. "Tidak ada kiriman asap ke negara tetangga, seperti yang disampaikan beberapa pihak. Atau seperti yang sering terjadi setiap tahun di masa lalu. Sekarang tidak ada lagi," kata Mahfud usai rakorsus tingkat menteri: peningkatan upaya penanggulangan karhutla, di KLHK, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

Mahfud mengatakan tahun ini memang terjadi peningkatan hotspot dan kebakaran hutan. Meski begitu, kata Mahfud, karhutla di 2023 lebih terkendali. "Telah terjadi pening katan hotspot dan kebakaran hutan dan lahan pada tahun ini, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya," papar dia.

Namun, jika dibandingkan dengan El Nino pada tahun 2019 yang lalu, yang sangat luas, karhutla pada El Nino tahun 2023 ini masih lebih kecil dan lebih terkendali," sambungnya.

Kepala Bappenas Ungkap Modus Daerah Akali Data Stunting Biar Dapat Insentif

JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Mo noarfa mengungkapkan banyak pemerintah daerah (pemda) keliru dalam menghitung jumlah stunting sehingga angkanya menjadi kecil. Hal itu agar mendapatkan insentif dari pemerintah pusat.

Demikian kata Suharso dalam Sosialisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik 2025-2029 kepada Partai Politik. Hal itu berda sarkan pengalamannya saat menerima data stunting dari seorang bupati yang tidak disebutkan namanya.

"Salah satunya itu bupatinya temannya Pak Amir (Uskara Wakil Ketua Komisi XI) yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, dia dengan bangga mengatakan dari 30-an menjadi 8%," kata Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

"Eh eh tunggu dulu he he he ini nggak mudeng, kalau orang yang berhitung nggak mungkin itu dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu nggak

Imbang, Kabau Sirah ...

untuk Kabau Sirah. Hanya saja, gol penye-imbang pasukan Ayam Kinantan berselang lima menit berikutnya. Papan skor 1-2 untuk tim tamu akhirnya tercipta melalui sepakan penalti legiun asing asal Brasil, M. Souza. Sepakan 12 pas itu setelah Moch Ichsan Cain dilanggar dalam kotak terlarang oleh Andika Kurniawan.

Pada babak kedua, serangan kedua kubu silih berganti. Dan pada menit 70 pemain pengganti Ahmad Ithwan sukses menyundul bola di sisi kiri kiper PSMS, Adixi Levezio, 2-2.

Hingga wasit Steven Yubel Poli meniup pluit panjang tidak tercipta gol tambahan. Papan skor 2-2 bertahan.

Dengan hasil imbang itu maka posisi pasukan Delfi Adri tetap bertahan di peringkat 3 dengan 8 poin. Laga berikut Semen Padang FC kembali memainkan laga kandang. Kali ini menjamu skuad asal Sumut juga yakni Sada Sumut FC pada Jumat (13/10) malam. (102)

Investor Bisa Pakai ...

Di dalamnya disebutkan, investor diberi kan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Adapun aset tanah yang tidak terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat di IKN dikelola langsung oleh Oto rita IKN. Hak atas tanah (HAT) ini bisa dipisahkan untuk kepen tingan umum, hingga dalam bentuk hak milik kepada investor.

Tertuang dalam pasal 16A UU IKN, hak atas tanah (HAT) berbentuk HGU ini dapat diberikan dalam dua kali siklus. Siklus pertama, diberikan dalam jangka waktu paling lama 95 tahun. Setelah siklus pertama, dapat diberikan perpanjangan dalam siklus kedua dengan masa yang sama. Sehingga secara akumulasi investor dapat menerima HGU selama 190 tahun.

"Dalam hal HAT yang diperjanjikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) dalam bentuk hak guna usaha, diberikan untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi pasal 16A ayat 1, dikutip dari salinan UU IKN, Senin (9/10).

Dalam penjelasan lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam satu siklus HGU ini diberikan dengan tahapan, pertama pemberian hak paling lama 35 tahun. Kedua, perpanjangan hak paling lama 25 tahun, dan ketiga pemberian hak paling lama 35 tahun.

Selain itu, dalam pasal 16A ayat 3 disebutkan pula bahwa hak guna bangunan (HGB) akan diberikan dalam jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertamanya. Setelah mele wati masa tersebut, investor dapat memper panjang kembali dengan jangka waktu yang sama. Dengan demikian, secara akumulasi in-vestor dapat menerima HGB selama 160 tahun.

Selain itu, Mahfud menuturkan pihaknya akan terus memonitor peningkatan hotspot tersebut. Mahfud juga menyebut siaga darurat karhutla akan terus dilakukan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Terutama pada daerah-daerah yang luas hotspot-nya dengan patroli terpadu oleh Porli dan dinas-dinas terkait, bahkan juga oleh LSM dan swasta, dengan memonitoring kawasan-kawasan yang kita anggap rawan," ungkap Mahfud dikutip *detikcom*.

Jokowi Respons Kiriman Asap

Presiden Joko Widodo bicara soal kebakaran hutan yang terjadi di mana-mana, apalagi di tengah kondisi cuaca panas saat ini. "Iya, ini memang panasnya itu, panasnya itu memang kemaraunya itu memang panjang, dan panasnya memang melebihi dari normal yang ada," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Senayan, Jakarta, Sabtu (7/10).

Jokowi tak memungkiri kebakaran hutan bisa terjadi di negara mana pun. Namun, menurut nya, kondisinya saat ini jauh lebih baik diban ding beberapa tahun lalu. "Tidak hanya di In-donesia kebakaran hutan itu terjadi. Di Amerika, di Kanada, dan kita-kita di sini bisa mengendalikannya. Coba bandingkan dengan 2015, masih jauh sekali," katanya.

Jokowi menabahkan setiap kebakaran hutan sudah barang tentu mengeluarkan asap. Faktor angin yang berembus bisa membawa asap ke mana-mana. "Tetapi memang yang kebakaran pasti mengeluarkan asap. Asapnya itu kalau kena angin, itu bisa ke mana-mana. Yang terpenting, saya sudah perintah kepada Panglima dan Kapolri dan pemda untuk segera menangani sekecil apa pun titik api sehingga tidak membesar," paparnya. (★)

Salah satunya itu bupatinya temannya Pak Amir (Uskara Wakil Ketua Komisi XI) yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, dia dengan bangga mengatakan dari 30-an menjadi 8%," kata Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

"Eh eh tunggu dulu he he he ini nggak mudeng, kalau orang yang berhitung nggak mungkin itu dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu nggak

Salah satunya itu bupatinya temannya Pak Amir (Uskara Wakil Ketua Komisi XI) yang memberikan data itu. Jadi datanya begini, dia dengan bangga mengatakan dari 30-an menjadi 8%," kata Suharso di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta Pusat, Senin (9/10).

"Eh eh tunggu dulu he he he ini nggak mudeng, kalau orang yang berhitung nggak mungkin itu dalam waktu 2-3 tahun bisa loncat seperti itu nggak

Enam OPD Bakal ...

Ini sesuai pula dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah. Katanya, hal yang dipertimbangkan yakni beban kerja, kompleksitas pekerjaan, ketersediaan sumber daya serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

"Atas dasar pertimbangan hal-hal tersebut maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap perangkat daerah, baik dengan melakukan perubahan/penyesuaian tipe, pemecahan dan pembentukan perangkat daerah baru maupun dengan melakukan penggabungan beberapa perangkat daerah," katanya.

Untuk diketahui, saat rapat paripurna tersebut diserahkan pula nota penjelasan ranperda perubahan tentang pengelolaan sampah. (401)

"Dalam hal hak guna bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A ayat (2) dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan perumahan, hak guna bangunan tersebut merupakan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan Otorita Ibu Kota Nusantara atau hak guna bangunan di atas Tanah negara," bunyi ayat 6 pasal 36B dikutip *detikcom*.

Untuk rinciannya, HGB untuk satu siklusnya juga diberikan dengan sejumlah tahapan, pertama pemberian hak paling lama 30 tahun. Kedua, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan ketiga pemberian hak paling lama 30 tahun.

Lebih lanjut dalam ayat 5 pasal 16A, disebut kan perpanjangan HGU maupun HGB ini dapat diberikan setelah dilakukannya evaluasi bersama antara Otorita IKN dan Kementerian ATR/BPN. Khusus untuk pengajuan perpan jangan HGU, dapat dilakukan bila memenuhi sejumlah kriteria, antara lain:

- Tanahnya masih diusahakan dan diman faatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak;
- Pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak;
- Syarat pemberian hak dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak;
- Pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- Tanah tidak terindikasi terlantar.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tahapan evaluasi, hak, kewajiban, larangan, dan peralihan HAT di wilayah Ibu Kota Nusantara diatur dalam Peraturan Pemerintah," bunyi ayat 6 pasal 16A.

Sebagai tambahan informasi, hal ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara. (★)